

Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pelestarian Cagar Budaya Melalui *Urban Heritage Tourism* di Kota Lama Semarang

Assyifa Shafia Adiyanti ¹⁾, Aditha Agung Prakoso ²⁾, Primantoro Nur Vitrianto ²⁾
Pariwisata, Pascasarjana, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta ^{1,2)}
Jl. Ahmad Yani Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul Yogyakarta
e-mail: syifashafia39@gmail.com

Abstrak

Pelestarian kawasan cagar budaya di perkotaan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor guna menjaga keberlanjutan nilai sejarah, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji pelestarian Kota Lama Semarang sebagai kawasan heritage melalui pendekatan *urban heritage tourism* berbasis model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku bisnis, dan media. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masing-masing pemangku kepentingan saling terkait secara dinamis: pemerintah sebagai regulator, komunitas sebagai penjaga nilai lokal, akademisi sebagai penyedia kajian kebijakan, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis heritage, dan media sebagai penyebar informasi serta pembentuk opini publik. Sinergi antarpihak terbukti memperkuat pelestarian fisik dan sosial kawasan, meskipun masih dijumpai tantangan berupa lemahnya koordinasi kelembagaan dan partisipasi yang belum merata. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis Pentahelix berpotensi meningkatkan efektivitas pelestarian cagar budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Kota Lama Semarang.

Kata kunci : Kota Lama Semarang, pelestarian cagar budaya, Pentahelix, *urban heritage tourism*, multipemangku kepentingan

Stakeholder Synergy in Preserving Cultural Heritage Through Urban Heritage Tourism in Semarang Old Town

Abstract

Urban cultural heritage preservation presents both challenges and opportunities for sustainable city development. Kota Lama Semarang, a historic district rich in colonial architecture and socio-economic value, holds strong potential for urban heritage tourism. However, preservation efforts are hindered by weak stakeholder synergy and limited implementation of sustainable policies. This study explores stakeholder roles and collaborative dynamics in preserving Kota Lama Semarang using a qualitative case study approach. Data were gathered through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed thematically. The results show that five stakeholder groups government, academia, business, community, and media are actively involved, as outlined in the Pentahelix model. Each plays a distinct yet interconnected role in supporting conservation and tourism development. While collaboration has contributed positively to the area's revitalization, issues remain in coordination and equitable stakeholder participation. The study concludes that integrated, multi-stakeholder collaboration is essential for the effective and sustainable preservation of urban heritage areas

Keyword: Kota Lama Semarang, cultural heritage preservation, Pentahelix, *urban heritage tourism*, multi-stakeholders

PENDAHULUAN

Pelestarian cagar budaya di kawasan perkotaan merupakan tantangan sekaligus peluang dalam membangun kota yang berkelanjutan. Kota Lama Semarang sebagai kawasan bersejarah memiliki nilai arsitektural,

sosial, dan ekonomi yang tinggi serta menyimpan narasi panjang sejarah kolonial dan perkembangan kota di Indonesia. Keberadaan bangunan berarsitektur Eropa, infrastruktur kota lama, serta aktivitas sosial ekonomi yang terus berlangsung menjadikan kawasan ini berpotensi besar sebagai destinasi *urban*

heritage tourism. Namun demikian, proses pelestariannya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dan lemahnya implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pelestarian, keterlibatan multipihak menjadi kunci keberhasilan. Konsep Pentahelix yang menggabungkan kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media menjadi kerangka strategis yang sering direkomendasikan dalam pengelolaan kawasan bersejarah (Beatrice & Hertati, 2023). Permadi et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi model ini terbukti mendukung pengakuan Kota Sawahlunto sebagai Warisan Dunia UNESCO, sedangkan Wibowo et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan budaya lokal akan efektif jika ada kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam aspek atraksi, promosi, edukasi, dan komersial. Hal ini sejalan dengan temuan Fadilah et al. (2023) yang mengidentifikasi berbagai peran stakeholder, mulai dari pengelolaan pariwisata oleh PT TWC, pelestarian oleh MCB, hingga promosi oleh media.

Berbagai studi mengenai *urban heritage tourism* turut memperkuat urgensi pendekatan partisipatif dan kontekstual. Liu et al. (2024) Liu et al. (2024) menekankan pentingnya adaptasi fungsional dan kompromi antar kepentingan dalam mendorong pelestarian berkelanjutan, sementara Zhao et al. (2023) dan Popescu et al. (2020) menekankan perlunya pola pembangunan yang seimbang dan integratif agar nilai-nilai warisan dapat lestari sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Nocca (2017) mengkritisi dominasi pendekatan ekonomi dalam proyek pelestarian yang sering mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan, sedangkan Farid (2020) menyarankan sinergi lintas sektor dan digitalisasi sebagai alternatif pendekatan yang efektif.

Di Kota Lama Semarang, meskipun telah tersedia berbagai regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Terdapat indikasi lemahnya koordinasi antarpihak, belum optimalnya peran pelaku bisnis dan media, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya secara aktif. Penelitian lokal turut menguatkan permasalahan ini. Meytasari & Tisnawati (2018)

menunjukkan bahwa kebijakan dan pengembangan kawasan Kota Lama Semarang masih terbatas pada aspek fisik tanpa strategi kolaboratif yang komprehensif. Sukmaratri (2018) dan Lak et al. (2020) menyoroti pentingnya lanskap sejarah dan ruang publik sebagai elemen vital dalam penguatan identitas kawasan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama: belum optimalnya keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya di Kota Lama Semarang; kurangnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan berbasis *urban heritage tourism*; serta lemahnya evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan kawasan cagar budaya secara kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta pemangku kepentingan dalam pelestarian kawasan Kota Lama Semarang, menganalisis sinergi dan interaksi antar pihak, serta mengevaluasi penerapan konsep *urban heritage tourism* yang berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif berbasis model Pentahelix.

KAJIAN PUSTAKA

Peran pemangku kepentingan sangat krusial dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya. Crosby (1992) membagi pemangku kepentingan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pemangku kepentingan utama, yakni pihak yang secara langsung menerima dampak dari suatu kegiatan, baik positif maupun negatif; pemangku kepentingan penunjang, yaitu perantara yang membantu menyampaikan atau menyukseskan kegiatan; serta pemangku kepentingan kunci, yakni aktor yang memiliki pengaruh kuat dan dianggap penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait isu dan kebutuhan yang sedang ditangani. Dalam konteks pelestarian cagar budaya Kota Lama Semarang, kategori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana masing-masing pihak baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, maupun media berkontribusi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan tersebut.

Model penta helix menekankan pada kerja sama lima aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pelestarian cagar budaya. Menurut Beatrice & Hertati (2023), lima aktor tersebut beserta perannya adalah akademisi sebagai konseptor yang berperan dalam memberikan basis keilmuan melalui riset dan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia (SDM); bisnis sebagai enabler yang berperan dalam pengolahan produk dan jasa berbasis nilai budaya menjadi komoditas ekonomi yang bernilai, termasuk dukungan terhadap infrastruktur dan digitalisasi pariwisata; komunitas sebagai akselerator yang berfungsi sebagai penjaga nilai lokal dan turut serta dalam promosi, edukasi, serta pelaksanaan kegiatan berbasis budaya secara langsung; pemerintah sebagai regulator yang menyediakan kerangka kebijakan, perencanaan wilayah, serta fasilitasi dan koordinasi antaraktor agar pelestarian dapat berjalan sistematis dan terintegrasi; serta media sebagai expander yang mendukung pelestarian melalui penyebaran informasi, pembentukan persepsi publik, dan dorongan partisipasi masyarakat luas dalam upaya konservasi. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai studi pengembangan wilayah dan terbukti relevan dalam konteks pelestarian Kota Lama Semarang yang melibatkan banyak kepentingan lintas sektor.

Pelestarian diartikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa cagar budaya terdiri atas benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya. Pelestarian tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga makna simbolik dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam suatu kawasan. Kota Lama Semarang, sebagai kawasan cagar budaya, merupakan ruang geografis yang mencakup berbagai bangunan dan situs bersejarah yang terhubung dalam pola tata ruang khas kolonial. Oleh karena itu, pendekatan pelestarian perlu memperhatikan konteks ruang dan komunitas yang ada di dalamnya. Menurut UNESCO (2024) dalam The World Heritage Convention, pelestarian dalam sektor pariwisata bertujuan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sejarah dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa mengurangi keautentikan dan integritasnya. Upaya pelestarian ini juga harus mendukung praktik pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pelestarian cagar budaya yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata juga selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-11, khususnya target 11.4, yaitu

“memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam dunia.”

Urban heritage tourism merupakan bentuk pariwisata yang berfokus pada warisan budaya perkotaan sebagai daya tarik utama. Ginting & Wahid (2015) menjelaskan bahwa kesinambungan antara elemen sejarah, memori kolektif, dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menjaga identitas kawasan serta memperkuat keberlanjutannya sebagai destinasi wisata. United Nation (2024) menegaskan bahwa pariwisata perkotaan memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. *Urban heritage tourism* dianggap mampu mendukung pelestarian kawasan bersejarah secara produktif, asalkan pengelolaannya memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian sumber daya budaya. Dalam konteks Kota Lama Semarang, pengembangan *urban heritage tourism* perlu didasarkan pada kolaborasi multipihak agar pelestarian warisan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, akademisi, pelaku bisnis, dan media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami pelestarian kawasan cagar budaya melalui pendekatan *urban heritage tourism* di Kota Lama Semarang (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang kompleks serta interaksi antar pemangku kepentingan (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang mewakili pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, akademisi, dan media (Sugiyono, 2010). Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas pelestarian dan pengelolaan kawasan, serta studi dokumen berupa kebijakan, arsip, dan literatur pendukung terkait kawasan cagar budaya (Miles et al., 2014).

Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kawasan (Patton, 2014). Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan langkah-langkah coding, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola hubungan dan

tantangan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dinamika sosial budaya serta strategi pelestarian yang berkelanjutan di kawasan Kota Lama Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pelestarian kawasan cagar budaya Kota Lama Semarang melalui pendekatan *urban heritage tourism* berbasis multipemangku kepentingan. Fokus utama penelitian adalah menggali peran dan interaksi pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi tantangan utama pelestarian. Pembahasan berikut disusun berdasarkan rumusan masalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan dinamika pelestarian kawasan

Peran Pemangku Kepentingan

Pelestarian cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan karakteristik dan peran yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama berperan sebagai penerima manfaat sekaligus penanggung dampak langsung dari proses pelestarian. Masyarakat merasakan adanya peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata, namun juga menghadapi pembatasan aktivitas tertentu untuk menjaga kelestarian kawasan. Peran aktif mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan serta keterlibatan dalam kegiatan budaya lokal menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pelestarian.

Pemangku kepentingan penunjang seperti akademisi dan media turut memberikan kontribusi signifikan. Akademisi berperan dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan melalui penelitian yang relevan dengan isu pelestarian dan pengembangan pariwisata heritage. Sementara itu, media memiliki fungsi strategis dalam menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan nilai-nilai pelestarian melalui pemberitaan yang konsisten. Sinergi keduanya memperkuat literasi publik terhadap pentingnya pelestarian kawasan bersejarah.

Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan kunci memiliki posisi sentral dalam penyusunan regulasi, pengawasan pelaksanaan, serta penyediaan anggaran untuk pelestarian. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Lama Semarang, koordinasi antar instansi dilakukan secara rutin melalui forum-forum

kolaboratif guna memastikan keselarasan antara pelestarian dan pengembangan pariwisata. Pemerintah juga mendorong partisipasi multipihak melalui kebijakan yang mendukung perlindungan aset budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterlibatan sinergis antara ketiga kelompok pemangku kepentingan masyarakat, akademisi-media, dan pemerintah berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan kawasan. Kolaborasi yang intensif membantu meminimalkan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan multipihak dalam pelestarian Kota Lama Semarang agar tujuan pelestarian budaya dan pembangunan pariwisata dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan.

Keterkaitan Peran Antar-Pemangku Kepentingan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kota Lama Semarang

Pelestarian kawasan heritage tidak dapat dijalankan secara parsial. Pendekatan *Urban Heritage Tourism* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya yang kompleks dan multidimensional. Sebagaimana dijelaskan oleh Mandaka (2021), warisan budaya mencakup tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga narasi sejarah, nilai sosial, ekspresi budaya, serta lanskap yang diwariskan lintas generasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Urban Heritage Tourism* di kawasan Kota Lama Semarang melibatkan sejumlah aktor yang saling terhubung secara kolaboratif. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan arah kebijakan, menyusun regulasi pemanfaatan ruang, serta mengawasi perlindungan bangunan cagar budaya. Hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha terbangun melalui insentif adaptasi bangunan untuk aktivitas ekonomi kreatif, seperti kafe dan galeri seni, yang tetap mempertahankan struktur dan nilai historisnya. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip pelestarian sekaligus pemanfaatan ekonomi.

Keterhubungan antara pelaku usaha dan komunitas lokal membentuk relasi timbal balik. Komunitas diberdayakan melalui penyediaan ruang bagi pelatihan, promosi seni, serta keterlibatan dalam penguatan narasi lokal. Sebaliknya, komunitas turut memperkaya pengalaman wisata melalui penyediaan konteks budaya yang autentik. Interaksi ini memperkuat pelestarian sosial serta

menciptakan nilai tambah ekonomi secara lokal.

Kolaborasi komunitas dengan akademisi juga menjadi komponen penting dalam pelestarian. Komunitas memberikan akses terhadap informasi sejarah, tradisi, dan dinamika sosial yang kemudian dimanfaatkan akademisi untuk penelitian maupun program pengabdian masyarakat. Namun, hubungan ini masih bersifat informal dan belum terstruktur secara kelembagaan. Padahal, kerangka kerja yang sistematis akan memungkinkan kontribusi akademik yang lebih berkelanjutan bagi pemberdayaan komunitas dan pengembangan kawasan heritage.

Peran media menjadi simpul penting yang menghubungkan seluruh aktor. Melalui fungsi diseminasi informasi, media membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pelestarian warisan budaya. Kerja sama antara media dan pemerintah, misalnya, tampak dalam promosi citra positif kawasan dan penyebarluasan program pelestarian. Narasi media yang menyentuh aspek emosional publik memperkuat dukungan masyarakat terhadap pelestarian kawasan.

Selain itu, pelestarian juga mencakup dimensi warisan takbenda, seperti kuliner. Gule Bustaman dan Lumpia Semarang merupakan produk akulturasi budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa yang mengandung nilai historis dan simbolik. Kuliner semacam ini bukan hanya menarik secara wisata, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memori kolektif masyarakat lintas generasi.

Secara keseluruhan, keterkaitan antar-pemangku kepentingan dalam pelestarian kawasan Kota Lama Semarang menunjukkan pola kolaborasi yang dinamis dan saling melengkapi. Pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku bisnis, dan media menjalankan fungsi yang saling memperkuat dalam mewujudkan pelestarian warisan budaya yang menyeluruh. Meski masih dijumpai tantangan dalam hal koordinasi dan ketimpangan partisipasi, arah kolaborasi yang terbangun telah menunjukkan potensi besar menuju pengelolaan kawasan yang lebih berkelanjutan secara fisik, sosial, dan ekonomi.

PENUTUP

Pelestarian cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media, sesuai dengan model Pentahelix. Kerangka hukum, seperti Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, memberikan landasan kuat bagi perlindungan dan pengelolaan cagar budaya secara berkelanjutan. Integrasi antara pelestarian dan pariwisata berbasis warisan budaya (*urban heritage tourism*) memperkuat nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian kawasan bersejarah.

Dukungan kebijakan, termasuk insentif fiskal dan pendanaan khusus, semakin mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian. Dengan demikian, pendekatan holistik yang memadukan aspek regulasi, ekonomi, dan sosial budaya menjadi kunci keberhasilan pelestarian cagar budaya, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs 11.4 dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatrice, C., & Hertati, D. (2023). Model Pentahelix dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Manggarsari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123.
<https://doi.org/10.25139/JMNEGARA.V7I2.6261>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell - SAGE Publications, Inc (2013) (1)*.
- Crosby, B. (1992). Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers. In *USAID's Implementing Policy Change Project (Vol. 2)*.
- Fadilah, R. J., Nuraeni, I., Sholeh, I., Noor, A. A., & Karmawati, H. (2023). Stakeholder Management Pada Situs Warisan Budaya. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(2), 166–173.
<https://doi.org/10.37253/ALTASIA.V5I2.7849>
- Farid, M. (Muhammad). (2020). Pelestarian Warisan Sejarah melalui Sinergi Antar-Stakeholder dan Digitalisasi Warisan sebagai Model Pengembangan Pariwisata Banda Naira. *Kamboti*, 1(1), 44–58.
<https://doi.org/10.51135/KAMBOTIVOL1ISS1PP44-58>

- Ginting, N., & Wahid, J. (2015). Exploring Identity's Aspect of Continuity of Urban Heritage Tourism. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 202, 234–241. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.08.227>
- Lak, A., Gheitasi, M., & Timothy, D. J. (2020). Urban regeneration through heritage tourism: cultural policies and strategic management. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18(4), 386–403. <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1668002>
- Liu, Y., Weaver, D. B., Dupre, K., & Jin, X. (2024). A stakeholder perspective on contested urban heritage and heritage tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/09669582.2024.2417233>
- Meytasari, C., & Tisnawati, E. (2018). The Tourism Element Product Development Of Semarang Old City Based On Attractive Urban Heritage Approach. *Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*, 16(1), 107–118. <https://doi.org/10.20961/ARST.V16I1.20432>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Method Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. PT Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nocca, F. (2017). The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development: Multidimensional Indicators as Decision-Making Tool. *Sustainability 2017, Vol. 9, Page 1882*, 9(10), 1882. <https://doi.org/10.3390/SU9101882>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Pub. L. No. 5, Database Peraturan BPK (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175985/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2021>
- Permadi, R., Junizar, F., Siregar, N. A. M., & Khadijah, U. L. S. (2021). The Role of Pentahelix Actors for Sawahlunto City to be Deemed a Unesco World Heritage. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 7(1), 7–19. <https://doi.org/10.22334/JBHOST.V7I1.253>
- Popescu, L., Nita, A., & Iordache, C. (2020). Place Identity, Urban Tourism and Heritage Interpretation: A Case Study of Craiova, Romania. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 22(4), 494–505. <https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1775401>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaratri, M. (2018). Kajian Objek Wisata Sejarah Berdasarkan Kelayakan Lanskap Sejarah Di Kota Palembang. *Jurnal Planologi*, 15(2), 164–179. <https://doi.org/10.30659/JPSA.V15I2.3071>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pub. L. No. 11, 1 (2010). <https://bphn.go.id/data/documents/10uu011.pdf>
- UNESCO. (2024). *UNESCO World Heritage Centre - The World Heritage Convention*. <https://whc.unesco.org/en/convention/>
- United Nation. (2024, March 1). *Quantifying tourism in city destinations – Towards a better understanding of urban tourism*. Quantifying Tourism in City Destinations – Towards a Better Understanding of Urban Tourism; UN Tourism. <https://doi.org/10.18111/9789284425341>
- Wibowo, F. X. S., Pallar, D. C., & Wardani, A. (2023). *Managing Local Culture in Tourism Area Based on Perception of Penta Helix*. 3–15. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-170-8_2
- Zhao, L., Li, Y., Zhang, N., & Zhang, Z. (2023). Public policies and conservation plans of

historic urban landscapes under the sustainable heritage tourism milieu: discussions on the equilibrium model on Kulangsu Island, UNESCO World Heritage site. *Built Heritage*, 7(1), 1–20.

<https://doi.org/10.1186/S43238-023-00086-0/FIGURES/12>